

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



OLEH:

RANI DELFIRA
BP/NIM: 2021/21060101

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

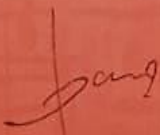
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

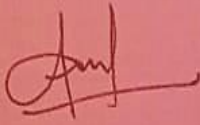
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN
BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Nama : Rani Delfira
NIM/TM : 21060101/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,


Dr. Novva Zulva Riani, S.E., M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Padang, Mei 2025
Disetujui dan Disahkan oleh
Pembimbing,


Dr. Ariusni, SE., M.Si
NIP.197703092008012011

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

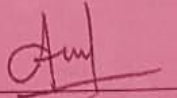
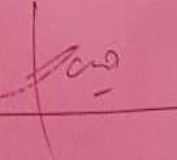
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Nama : Rani Delfira
NIM/TM : 21060101/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Mei 2025

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Dr. Ariusni, SE., M.Si	1. 
2	Anggota	: Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Maizul Rahmizal, SE, M.Sc	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Delfira
NIM/TM : 21060101 / 2021
Tempat/Tanggal Lahir : Biaro / 12 Januari 2003
Departemen/Keahlian : Ilmu Ekonomi / Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung
No. HP : 083181121131

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 23 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Rani Delfira
NIM.21060101

ABSTRAK

Rani Delfira (21060101): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Ariusni, SE. M.Si

Pada tahun 2014 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung cenderung stagnan dan diatas angka nasional. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,66 persen karena pandemi Covid-19. Pada masa pemulihan dari terjadinya pandemi, yaitu tahun 2021 sampai 2022 pemulihan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih lambat dibandingkan nasional dan belum mencapai angka sebelum pandemi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung Pemerintah cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dan lebih besar dari angka sebelum terjadinya pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Langsung Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Menggunakan metode Regresi Data Panel yang mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Kata Kunci :Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Langsung Pemerintah, Regresi Data Panel

ABSTRACT

Rani Delfira (21060101): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Ariusni, SE. M.Si

From 2014 to 2019, economic growth in Lampung Province tended to stagnate and was above the national figure. However, in 2020 it decreased by - 1.66 percent due to the Covid-19 pandemic. During the recovery period from the pandemic, namely from 2021 to 2022, the recovery of economic growth in Lampung Province was slower than the national figure and had not reached the pre-pandemic figure. Meanwhile, Regional Original Income, Balancing Funds and Direct Government Expenditures tended to increase each year and were greater than the figures before the pandemic. This study aims to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Direct Government Expenditures on Economic Growth in Lampung Province. Using the Panel Data Regression method covering 15 districts/cities in Lampung Province from 2014 to 2022. The results of the study show that Regional Original Income and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Economic Growth. General Allocation Funds and Direct Government Expenditures have a positive and insignificant effect on Economic Growth. Revenue Sharing Funds have a negative and insignificant effect on Economic Growth. Together, Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Government Expenditure have a significant influence on Economic Growth in Lampung Province.

Keywords: Economic Growth, Local Original Income, Balancing Funds, Direct Government Spending, Panel Data Regression

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik, skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era ilmu pengetahuan, sebagaimana yang penulis rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Renaldi dan ibunda Neli Susanti, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tulus dalam mengantarkan penulis hingga tahap ini. Saudara-saudara tersayang, Rentia Gusneli, Nina Afrilia, dan Farid Azzikri, yang selalu menjadi panutan dan memberikan kepercayaan penuh terhadap impian penulis. Serta Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Ariusni, SE. M,Si sebagai dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan, serta saran yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE. M.Si selaku dosen Penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini dan selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Maizul Rahmizal, SE. M.Sc selaku dosen penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, atas ilmu, motivasi, serta bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu staf tata usaha dan staf perpustakaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atas bantuan dan kemudahan dalam pengurusan akademik.
8. Kakak Asma Lidya, A.Md selaku admin Departemen Ilmu Ekonomi, yang selalu membantu dalam pengurusan administrasi.
9. Seluruh teman dan sahabat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri “Rani Delfira” atas ketekunan, kerja keras, dan kesabaran yang telah saya

jalani selama penelitian ini. Saya merasa bangga atas usaha yang telah dilakukan, melewati berbagai tantangan dan rintangan tanpa menyerah. Setiap kesulitan yang saya hadapi telah menjadi pembelajaran berharga yang membuat saya semakin berkembang. Saya juga ingin mengingatkan diri sendiri bahwa pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan selanjutnya. Semoga semangat untuk terus belajar dan berkembang senantiasa menyertai setiap langkah ke depan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan berharap agar segala bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, April 2025

Rani Delfira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kajian Teori.....	18
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2. Teori Desentralisasi Fiskal	27
3. Pendapatan Asli Daerah	30
4. Dana Perimbangan	35
5. Belanja Pemerintah	42
B. Penelitian Terdahulu.....	45
C. Kerangka Konseptual	48
D. Hipotesis Penelitian.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian	52
C. Variabel Penelitian.....	53
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Definisi Operasional.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	56
1. Analisis Deskriptif.....	56
2. Regresi Data Panel (<i>Pooled Analysis</i>).....	57

3. Model Estimasi Regresi Panel.....	58
4. Pemilihan Model	59
5. Uji Persyaratan Analisis	61
6. Pengujian Hipotesis.....	63
7. Uji Koefisien Determinan (R^2).....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian	66
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	66
2. Analisis Deskriptif.....	68
3. Analisis Data	72
B. Pembahasan.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2022 (miliar rupiah).....	3
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Persen)	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Rupiah).....	8
Tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Rupiah)	10
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014-2022 (Rupiah).....	13
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif	69
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	73
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	74
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier	75
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoloniaritas.....	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Data Panel.....	78
Tabel 4.8 Hasil Uji t	80
Tabel 4.9 Total Belanja Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Rupiah).....	85

BAB I

PENDAHULUAN

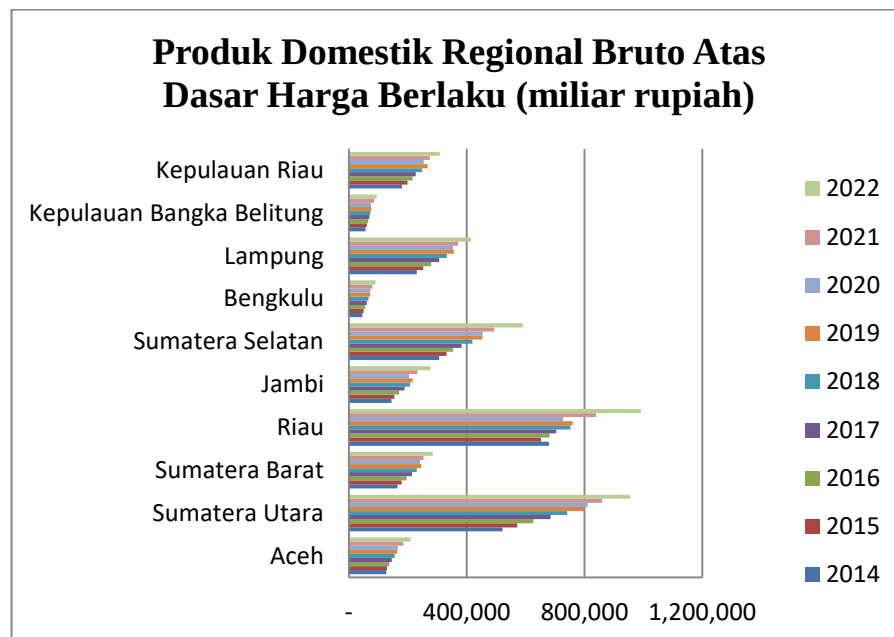
A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kesempatan besar bagi daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah agar partisipasi daerah lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Selain meningkatkan partisipasi, otonomi daerah juga diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Otonomi daerah adalah salah satu instrumen utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberi lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan pembangunan merata di seluruh Indonesia (Bahasoan & Anwar, 2024). Pembangunan ekonomi merupakan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan salah satu prioritas dalam Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan berlandaskan sistem kerakyatan (Yasin, 2020).

Negara-negara berkembang sangat bersemangat untuk melakukan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya adalah negara Indonesia, yang merupakan negara berkembang dan selalu berupaya untuk menstabilkan perekonomiannya. Intervensi pemerintah dalam ekonomi berperan penting untuk memastikan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan optimal. Menurut pandangan Keynes, untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, diperlukan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian, baik melalui kebijakan moneter (seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar) maupun kebijakan fiskal (termasuk perpajakan dan pengeluaran pemerintah) (Fadli et al., 2023).

Pulau Sumatera merupakan bagian dari Indonesia yang mempunyai sepuluh provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Setiap provinsi di pulau Sumatera mempunyai tingkat perekonomian yang berbeda. Kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada umumnya tercermin dari kemampuan daerah tersebut dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menjadi indikator utama untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu (Pasalbessy, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

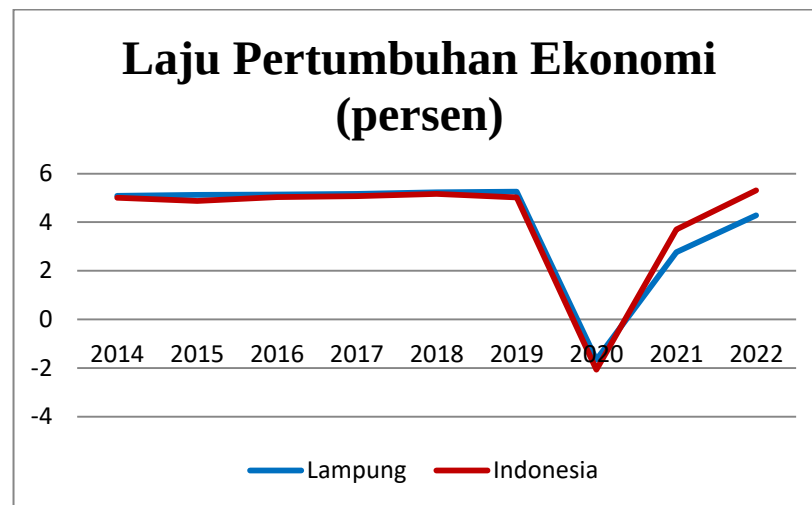
Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2022 (miliar rupiah)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Pada gambar terlihat bahwa Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang menjadi urutan ke 4 memiliki PDRB terbesar di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan. Lampung merupakan daerah Sumatera bagian Selatan yang berseberangan dengan Pulau Jawa. Berdasarkan letak yang strategis ini harusnya tingkat pertumbuhan di Lampung lebih unggul dari Provinsi lain yang ada di Sumatera. PDRB Provinsi Lampung mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena terjadinya Covid-19 yang melanda secara global, termasuk di Indonesia. Pandemi ini menyebabkan gangguan pada

berbagai sektor ekonomi, terutama perdagangan, pariwisata, transportasi, dan industri pengolahan yang menjadi penyumbang utama PDRB.

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang sudah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sebagai provinsi otonom, Lampung memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, membuat kebijakan pembangunan, dan mengembangkan sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi andalan provinsi tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Pada periode 2014 hingga 2022, Provinsi Lampung mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang sebesar 3,77 persen. Provinsi ini terdiri dari 15 kabupaten/kota dengan tingkat perekonomian yang belum merata. Perbedaan karakteristik geografis, sumber daya alam, dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota menyebabkan kemampuan masing-masing daerah dalam menghasilkan PDRB bervariasi. Lampung sebagai gerbang utama penghubung Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi nasional, lokasinya yang strategis sebagai jalur distribusi barang antara Pulau Jawa dan Sumatera menjadikan Lampung berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung umumnya mengikuti pola pertumbuhan nasional dengan angka yang cukup sebanding, meskipun terdapat variasi di setiap tahun. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional hingga tahun 2019. Dampak pandemi Covid-19 pada 2020 terlihat pada kedua wilayah, dengan Provinsi Lampung mengalami kontraksi sebesar -1,66 persen dan Indonesia sebesar -2,07 persen. Pemulihan di Provinsi Lampung lebih lambat dibandingkan nasional, dengan pertumbuhan sebesar 2,77 persen pada 2021 dan 4,28 persen pada 2022, sementara Indonesia pulih lebih cepat dengan pertumbuhan mencapai 5,31 persen pada 2022. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Provinsi Lampung sempat lebih kuat sebelum pandemi, tingkat pemulihannya sedikit tertinggal dibandingkan dengan tren nasional. Laju pertumbuhan

ekonomi Provinsi Lampung ini masih belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi.

Pemanfaatan sumber daya keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan keuangan dari segi penerimaan maupun pengeluaran (Basri et al., 2025). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam membiayai pembangunan. Semakin besar pendapatan asli daerah, diharapkan semakin cepat pula pertumbuhan ekonominya. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat membantu daerah yang membutuhkan, agar pembangunan bisa lebih merata. Selain itu, efektivitas belanja pemerintah, terutama pada sektor-sektor produktif, menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana alokasi anggaran dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja pemerintah menjadi elemen penting untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah.

Di era otonomi daerah, sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin besar pendapatan yang diterima, semakin baik karena hal ini berdampak positif pada pembiayaan pembangunan ekonomi daerah. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk pembangunan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Meylani et al., 2019).

Desentralisasi fiskal memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan guna membiayai pengeluaran daerah dalam mendukung pelayanan publik. pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mencari dana untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai prinsip desentralisasi. pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh langsung dari sumber daya daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Ini penting untuk menilai seberapa mandiri suatu daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah menjadi indikator utama yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga menggambarkan tingkat kemandirian daerah tersebut (Pratama, 2021).

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber utama keuangan daerah.

Berikut merupakan data pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
1	2014	2.274.685.572.913
2	2015	2.247.342.667.611
3	2016	2.368.796.251.247
4	2017	2.750.596.478.331
5	2018	2.864.235.753.079
6	2019	3.018.067.291.160
7	2020	2.842.286.479.070
8	2021	3.249.669.847.265
9	2022	3.678.302.295.132

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari penyajian data realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Lampung yaitu tahun 2014-2022, Dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.678.302.295.132 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.247.342.667.611. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan di tahun 2015 dari Rp2.274.685.572.913 pada tahun 2014 menjadi Rp2.247.342.667.611 dan pada tahun 2020 dari Rp3.018.067.291.160 pada tahun 2019 menjadi Rp2.842.286.479.070. Penurunan pendapatan asli daerah ini dapat mengindikasikan masalah dalam kemandirian fiskal daerah, secara teoritis sangat penting untuk memastikan daerah dapat menjalankan fungsinya secara efektif tanpa ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat.

Dengan adanya pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber dana pemerintah daerah bergantung pada peran pendapatan asli daerah. Diharapkan pendapatan asli daerah dapat menjadi sumber utama untuk membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber daerah, sehingga keuangan daerah dapat lebih besar dan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini juga akan memberi daerah lebih banyak kebebasan untuk mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan daerah tersebut.

Selain pendapatan asli daerah suatu daerah juga memiliki dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Menurut Amandemen Undang-Undang Pemda (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah bahwa dana perimbangan meliputi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan dari dana ini adalah untuk mengurangi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, maka ketergantungan daerah terhadap dana Perimbangan atau dana yang diberikan oleh pemerintah pusat akan semakin berkurang, dan sebaliknya. Berikut merupakan data dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Rupiah)

No	Tahun	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Bagi Hasil
1	2014	1.136.053.041.000	48.851.620.000	287.581.907.000
2	2015	1.097.129.439.000	245.066.400.000	172.095.689.000
3	2016	1.321.679.032.000	1.651.557.871.000	185.475.997.000
4	2017	1.851.595.354.000	542.809.262.000	249.340.043.000
5	2018	1.854.701.094.000	745.585.220.000	216.041.063.000
6	2019	1.906.780.297.000	581.870.716.000	138.544.335.000
7	2020	1.732.551.921.000	571.540.325.000	157.793.963.000
8	2021	1.726.296.248.000	2.232.553.877.000	225.542.359.000
9	2022	1.719.175.461.000	1.251.722.552.000	253.438.084.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

Dana Alokasi Umum adalah salah satu komponen utama dari dana perimbangan, memiliki sifat yang lebih fleksibel dibandingkan komponen lain dari dana perimbangan seperti dana alokasi khusus yang bersifat spesifik. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan untuk membantu menyamakan kemampuan keuangan antar daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat data realisasi dana alokasi umum Provinsi Lampung selama sembilan tahun yaitu tahun 2014-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 dana alokasi umum sebesar Rp1.136.053.041.000 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.097.129.439.000 pada tahun 2015. Setelah itu, dana alokasi umum terus

meningkat hingga puncaknya pada 2019, mencapai Rp1.906.780.297.000. dana alokasi umum mengalami penurunan dari Rp1.732.551.921.000 pada tahun 2020 hingga Rp1.719.175.461.000 pada tahun 2022.

Selain dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dana lain yang dialokasikan yaitu dana alokasi khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Santoso et al., 2021). dana alokasi khusus untuk Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada awal periode, yakni tahun 2014, Lampung menerima dana alokasi khusus sebesar Rp48.851.620.000, jumlah yang relatif kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan signifikan, dengan alokasi mencapai Rp245.066.400.000 dan Rp1.651.557.871.000. Setelah itu, terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp542.809.262.000, namun naik lagi di tahun 2018 menjadi Rp745.585.220.000, menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020, dana alokasi khusus yang diterima adalah Rp 581.870.716.000 dan Rp571.540.325.000, yang relatif stabil. Tahun 2021 mencatatkan puncak tertinggi dalam alokasi dana alokasi khusus sebesar Rp2.232.553.877.000, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca-pandemi. Kemudian, pada tahun 2022, alokasi kembali menurun ke angka Rp1.251.722.552.000, yang masih cukup tinggi namun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Perubahan besar ini bisa dipengaruhi oleh prioritas nasional,

anggaran pusat, serta kebutuhan spesifik proyek-proyek daerah setiap tahunnya.

Menurut Undang- Undang No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam upaya pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Pada awal periode, jumlah dana yang diterima sebesar Rp287.581.907.000 di tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya dengan beberapa kenaikan, seperti pada tahun 2017 sebesar Rp249.340.043.000 dan tahun 2021 sebesar Rp225.542.359.000 sampai Rp253.438.084.000 pada tahun 2022. Fluktuasi dana ini berimplikasi pada kemampuan Provinsi Lampung untuk melakukan penganggaran yang stabil bagi pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan ekonomi agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercapai. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pengeluaran atau belanja. Belanja pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan program pemerintah. Sementara itu, belanja langsung adalah pengeluaran yang langsung mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Prisilia et al., 2020). Namun, penelitian ini hanya berfokus pada belanja langsung pemerintah yaitu belanja daerah yang

dianggarkan dan berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Adapun yang termasuk kedalam belanja langsung yaitu belanja pegawai upah honorarium, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Data belanja langsung pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014-2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014-2022 (Rupiah)

No	Tahun	Belanja Langsung Pemerintah (Rupiah)
1	2014	2.309.626.502.536
2	2015	2.106.306.263.239
3	2016	2.044.023.428.191
4	2017	2.818.713.161.361
5	2018	3.039.153.600.012
6	2019	2.457.315.916.819
7	2020	2.416.103.473.492
8	2021	2.356.202.276.832
9	2022	2.841.749.366.948

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat dari penyajian data pengeluaran belanja pemerintah Provinsi Lampung yaitu tahun 2014-2022. Terdapat fluktuasi dalam jumlah belanja langsung selama periode ini. Pada awalnya, belanja langsung sebesar Rp2.309.626.502.536 pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai Rp2.044.023.428.191 pada tahun 2016. Namun, belanja langsung meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya sebesar Rp3.039.153.600.012 pada tahun 2018. Setelah itu, terjadi penurunan kembali, dengan nilai belanja langsung sebesar Rp2.356.202.276.832 pada tahun 2021, pada tahun 2022 kembali naik sebesar

Rp2.841.749.366.948. Fluktuasi ini mencerminkan adanya perubahan dalam alokasi belanja langsung yang dipengaruhi oleh prioritas kebijakan pemerintah atau perubahan ekonomi selama periode tersebut.

Secara umum pendapatan pemerintah yaitu pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki angka yang fluktuatif, namun cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19, sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi Lampung sendiri juga mengalami penurunan yaitu -1,66 persen. Belanja langsung pemerintah pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena selama pandemi Covid-19 berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak langsung. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 merupakan masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang jumlah dananya lebih besar dari dana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, akan tetapi Pertumbuhan Ekonomi Lampung belum mencapai angka sebelum pandemi Covid-19.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pengaruh sumber dana daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, secara khusus belum ada yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja langsung pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini menciptakan kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut agar pemerintah daerah dapat lebih memahami dan mengoptimalkan anggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini penting karena pengelolaan dana tersebut menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat membantu merancang kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan memastikan bahwa pengeluaran belanja pemerintah digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan memperlihatkan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap pertumbuhan ekonomi. Rentang waktu yang digunakan adalah dari tahun 2014-2022. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Sejauh mana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?
2. Sejauh mana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?
3. Sejauh mana Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan di Provinsi Lampung?
4. Sejauh mana Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?

5. Sejauh mana Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?
6. Sejauh mana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Langsung Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung Pemerintah secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (SI) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah, sesuai dengan sasaran utama kebijakan tersebut. Membantu mengidentifikasi strategi pengembangan yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak lain yang berkopeten terhadap masalah yang dibahas, menjadi referensi dan diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2014-2022. Berdasarkan pada hasil analisis regresi data panel yang menggunakan *Random Effect Model* (REM) maka dapat diambil kesimpulan:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung juga akan ikut meningkat.
2. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini terjadi dikarenakan DAU yang dialokasikan tidak merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung, yang artinya apabila Dana Alokasi Khusus meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung juga akan ikut meningkat.
4. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Dana Bagi Hasil (DBH)

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Artinya peningkatan pada Dana Bagi Hasil tidak ikut menaikkan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini terjadi karena Dana Bagi Hasil yang tidak merata atau kurang didukung oleh perencanaan pembangunan yang baik dapat mengurangi dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

5. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Belanja Langsung Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini terjadi karena alokasinya belum efektif mendorong sektor produktif.
6. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, memerlukan kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Lampung mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola keuangan, pemaksimalan penerimaan dari pajak dan retribusi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Pemanfaatan DAK sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, pengelolaan anggaran perlu

dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Pemerintah daerah di provinsi Lampung mampu lebih baik mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pendistribusian DAU agar lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DAU dalam mendukung kemajuan ekonomi. Peningkatan efisiensi alokasi DAU dapat meminimalkan dampak negatif yang terjadi. Perencanaan dan pengelolaan DBH perlu ditingkatkan, dengan fokus pada pemerataan dan transparansi. Pengalokasian DBH dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Pemerintah daerah juga harus memiliki perencanaan pembangunan yang lebih matang untuk memaksimalkan manfaat dari DBH. Sementara itu, belanja langsung pemerintah perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis mendalam terkait mekanisme distribusi DAU, DBH dan belanja langsung pemerintah

serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dalam alokasi dana dengan kebutuhan pembangunan. Penelitian ini juga perlu memperhatikan karakteristik ekonomi setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penelitian selanjutnya bisa memasukkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi, seperti pengaruh kebijakan fiskal daerah, investasi daerah, atau faktor eksternal lain yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Syntax Idea*, 4(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i1.1714>
- Agatha Shellenia Vitara, U. A. A. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dalam Pengentasan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. *JURNALKU*, 1(3), 156–176.
- Andry Mokoginta, Daisy S.M. Engka, M. T. B. M. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(3), 284–303.
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.03>
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi ke-4). Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Atia Anggraini, Tri Inda Fadhila Rahma, K. T. (2022). Pengaruh ZIS, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 50–63.
- Bahasoan, A. N., & Anwar, A. I. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 43–46. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Basri, H., Devita, A., Fahmi, A., & Siregar, J. U. (2025). Determinan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Strategi Peningkatannya di Provinsi Jambi. *Journal of Economics and Business*, 9(1), 115–122. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2119>
- British Kharismanissa Islami, B. O. N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Bogor 2010-2016. *Jurismata*, 2(1).
- Citra Anggraeni, Lili Erina, S. E. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Anggaran Publik pada Organisasi Publik di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal*

Administrasi Publik, 1, 1–11. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.9>

Damara, D. T. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019*.

Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fadli, Z., Siagian, A. O., Siregar, N., Amelia, D., Januardani, F. D., Mardika, N. H., Belani, S., & Jamil, M. (2023). *Ekonomi Makro : Teori-Teori Pengantar* (C. Dr. Elfiswandi, S.E, Ak, CA, M.M (ed.); 7th ed.). CV. Gita Lentera.

Falianty, T. A. (2019). *Teori Makro dan Penerapannya di Indonesia* (edisi 1). Rajawali Pres.

Fatmawati, Zikriatul Ulya, A. H. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(April), 67–88.

Gabryel D. Purnomo, Debby Christina Rotinsulu, I. P. R. (2022). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(8), 121–132.

Gujarati, D. N. dan D. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika* (edisi 5).

Hamdani, I., Sri Nesta, N., Rahmawati, J., & Hidayat, F. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 167–183. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.887>

Hasrullah Hasrullah, Harna Rizki Wisesa, Indriana Andani, D. D. (2024). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor UMKM. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (DINAMIKA)*, 4(2), 134–144.

Ignasia V. Dua Kuki, Munawar, Y. P. D. (2019). Pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit*, 4(2), 14–17.

Irman, M., & Purwati, A. A. (2020). Analysis On The Influence Of Current Ratio , Debt to Equity Ratio and Total Asset Turnover Toward Return On Assets On

The Otomotive and Component Company That Has Been Registered In Indonesia Stock Exchange Within 2011-2017. *International Journal of Economics Development Research*, 1(1), 36–44.

Isubalew Daba Ayana, Wondaferahu Mulugeta Demissie, A. G. S. (2024). On the government revenue on economic growth of Sub-Saharan Africa : Does institutional quality matter ? *Heliyon*, 10(2), e24319. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24319>

Jacob, J., & Waibot, Z. (2022). Mengukur Output Gap Ekonomi Maluku Utara (Pendekatan Hodrick-Prescott Filter). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 212–221. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.09>

Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cafetaria*, 3(1), 1–13.

Jory S Dauhan, Josep B Kalangi, K. C. T. (2020). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 55–61.

Kaontole Frits Junior , Debby Ch. Rotinsulu, S. Y. L. T. (2019). Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 76–84.

Karmen Marpaung, Dedi Takari, C. D. O. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Growth*, 7, 127–134.

Koilam, C. T. ., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. . (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengeluaran Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 25–36.

Kristianti, D. S. (2021). Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat. *Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 90–113.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang* (W. C. Kristiaji (ed.)). Erlangga.

- Lampung Post. (2023). *Menanti solusi dana bagi hasil provinsi*. Diakses pada 1 Mei 2025, dari <https://lampost.co/epaper/kolom/menanti-solusi-dana-bagi-hasil-provinsi/>
- Latuheru, A. (2024). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura. *Journal of Economics & Development Studies*, 1(2), 66–77.
- Lian Arke Mokorowu, Debby Ch. Rotinsulu, D. S. M. E. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana bagi hasil (dbh, dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten minahasa tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(04), 81–94.
- Lita Febrianti. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 19–26. <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1992>
- Lulage, J., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 229–240.
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2020). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 62–72.
- Mandupessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4, 39–57.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016* (2016th ed.). Andi.
- Maria Sisilia, H. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 20102019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70.
- Metta Maheni, M. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Proceeding*

SENDIU, 6(72), 978–979.

- Meylani M. Arina, Rosalina A.M. Koleangan, D. S. M. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26–35.
- Mica Siar Meiriza, Debora Tarigas Marpaung, Nikasyah Limbong, S. W. B. T. (2023). Analisis ekonomi neo klasik terhadap perkembangan ekonomi menurut robert solow dan trevor swan. *Jurnal Ekonomi Dinamis*, 5(4).
- Nurkodri, M. S., & Amir, A. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 29–38.
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & Yanuar, A. B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(April), 2200–2208.
- Pasalbessy, V. F. F. D. (2024). Analisis Pengaruh Sektor Industri Pengolahan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 160–168. <https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb>
- Pratama, F. W. (2021). Analisis peranan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten wonogiri. *INISIASI*, 10(2), 103–114.
- Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2020). Pengaruh PAD , DAU , DBH , dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1), 1–14.
- Prisilia Tempone, Josep B. Kalangi, Hanly Fendy DJ, S. (2020). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 134–144.
- Puspitasari, L. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Adhk (Atas Dasar Harga Konstan) di Kabupaten Berau. *Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 5(1).
- Putri, M. D., & Aimon, H. (2024). Analisis Pengeluaran Pemerintah Dan

- Likuiditas Perekonomian. *Media Riset Ekonomi Pembangunan*, 1(4), 633–670.
- Rahman, A. G., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2022). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Wilayah Sulawesi). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume*, 22(2), 64–74.
- Rahmawati, A., Lutfiani, L., Yunia, Z. R., & Rofiqoh, I. (2021). Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Efektor*, 8(1), 79–88.
- Rahmawati, H. (2023). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 77–82. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.745>
- Regina, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 36–45. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.201>
- Ridwan, D., & Anis, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index>
- Santoso, S. F., Bantasyam, S., & Astuti, S. B. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *JLAP*, 1(September), 94–105.
- Sinto, Diana Zuhroh, D. S. C. (2023). Analisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan penyertaan modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 12(2), 549–558.
- Sugiharti, A. W. N. L. (2023). Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 416–428.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Kedua). Jakarta: Kencana.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Ketiga). Jakarta: PT

Rajawali Pers.

Taher, S., & Tuasela, A. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika Salbia Taher 1) ,Antje Tuasela 2) 1. *Jurnal Kritis*, 3, 40–58.

Todaro, M. P. and S. C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (kesebelas). Erlangga.

Tumaleno, A. F. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 189–195.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

Utami, D. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan. *Jurnal Kompetitif*, 12(2), 189–200. <https://ejournal.univ-tridinantia.ac.id/index.php/kompetitif/index>

Wahyudi, S. T. (2020). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-views* (Edisi ke-2). Rajawali Pers.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.).

Winarno, Wing Wahyu. (2009). *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 3, 465–472.

Yofhi Septian Panglipurningrum, T. N. (2020). Konsumsi, Investasi, Pengeluaran

Pemerintah Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2010 – 2019. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 200–210. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/kelola/article/view/773>.